

SKRIPSI

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

SISKA

10573 0421813



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

SKRIPSI

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

SISKA

10573 04218 13

**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Siska

No. Stambuk : 10573 0421813

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitian skripsi setara satu (SI) pada hari sabtu 14 oktober 2017 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.Abd.Rahman Rahim,MM

NBM: 651073

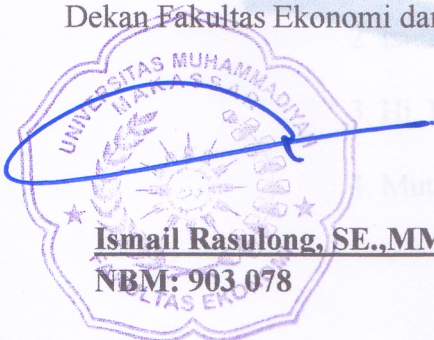
Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA

NIDN:0915058801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Rasulong, SE.,MM

NBM: 903 078

Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA

NIDN:0915058801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama SISKA , NIM 105730421813 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1439 H/2017 M dan telah dipertahankan didepan tim penguji pada hari Sabtu , 14 oktober 2017 M, sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar , 24 Muharram 1439 H

14 oktober 2017 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM

(Dekan Fakultas Ekonomi)

3. Sekertaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM

(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi)

4. Penguji : 1. Drs. H. Sultan Sarda, MM

2. Ismail Badollahi, SE., M.Si, AK/CA

3. Hj. Naidah, SE., M.Si

4. Muttiarni, SE., M.Si

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri”

(QS. Al-Ra'd 11)

Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus bergerak

(Albert Einstein)

Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak, walaupun
demikian air laut tetap masuk kedalam pori-porinya

(Hitam Putih)

ABSTRAK

SISKA 2017. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Dibimbing Oleh(Ismail Badollahi Dan H.Abd. Rahman Rahim)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh efektivitas terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama SUL-SEL. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan program spss. Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa Thitung 33,968 dengan nilai signifikansi $0,021 < 0,05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien 0,930 menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kata Kunci :StandarAkuntansiPemerintahan, KualitasLaporanKeuangan

KATA PENGANTAR



Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nyaterutama nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama SUL-SEL”**.

”. Penulisan skripsi ini merupakan upaya untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi yaitu memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mengakui masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Keadaan ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan penulis. Maka dari sebab itu penulis sangat bersyukur dan haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas junjungan rahmat dan petunjuk-Nya melalui pihak-pihak yang dengan segala kerendahan hati membimbing penulis.

Suatu penghargaan tertinggi penulis memberikan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Umar dan Mare Kalsum yang selalu sabar mendengar keluhan ananda dan tanpa henti memberikan dukungan moril sampai skripsi ini selesai.

Kemudian skripsi ini dapat terwujud, semua berkat partisipasi dan kontri busi segenap pihak yang sungguh berarti. Karena itulah dengan penghargaan dan kerendahan hati penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM selaku pembimbing I dan bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu penguji yang telah memberikan penilaian yang baik, sehingga kami berhak memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
6. Bapak/ibu pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya yang membidangi ilmu akuntansi atas kesediaannya yang telah membimbing serta menata pola pikir selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Pimpinan Kantor Wilayah Kementrian Agama SUL-SEL beserta karyawan yang dengan tulus membantu bekerja sama dengan baik selama proses penelitian berlangsung guna penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh teman-teman angkatan 2013 jurusan akuntansi khususnya kelas AK.5-13 yang setia menemani dari awal hingga sekarang.
9. Untuk pacar saya tersayang Mapparenta Syamsuddin yang selalu bersabar menemani saya dan selalu mengsupor saya sampai skripsi ini terselesaikan
10. Untuk sahabat-sahabat saya yang saya banggakan Rosmita, Ma'rifatul Jihadi dan Nur Alamsyah yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada hentinya hingga terselesainya skripsi ini.

Skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna tanpa kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak. Harapan kami skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya bagi semua pihak. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin...*

Makassar, Juli 2017

penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual	8
2. Penerapan Standar Akuntansi Basis Akrual.....	9
3. Efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan	9
4. Standar Akuntansi Pemerintahan	10
5. Akuntansi Pemerintahan	11

a.	Pengertian akuntansi pemerintahan.....	11
b.	Tujuan Akuntansi Pemerintahan	13
c.	Karakteristik Akuntansi Pemerintahan	15
6.	Laporan keuangan pemerintah	16
a.	Pengertian laporan keuangan pemerintah	16
b.	Tujuan laporan keuangan	17
c.	Komponen laporan keuangan.....	19
d.	Analisis laporan keuangan	21
e.	Kualitas laporan keuangan	21
B.	Penelitian Terdahulu	26
C.	Kerangka Pemikiran.....	33
D.	Hipotesis	35
BAB III	METODE PENELITIAN	36
A.	Tempat dan Waktu Penelitian	36
B.	Jenis dan Sumber Data	36
C.	Populasi dan Sampel	36
D.	Metode Pengumpulan Data	37
E.	Definisi Operasional Variabel.....	39
F.	Metode Analisis Data.....	43
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	46
A.	Sejarah Singkat Perusahaan	46
B.	Visi dan Misi Perusahaan.....	49

C. Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Sistem akuntansi pemerintahan dikanwil	56
B. Hasil penelitian	57
C. Pembahasan	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 <i>Mapping</i>	29
Tabel 5.1 uji validitas	57
Tabel 5.2 uji reliabilitas	59
Tabel 5.3 Uji Regresi linier sederhana	59
Tabel 5.4 uji R square	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat izin penelitian	71
2. Koesineor	72
3. SPSS	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggung jawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk sistem yang tepat.

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat diharapkan membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Dalam hal desentralisasi keuangan dan otonomi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan suatu paket kebijakan tentang pengelolaan keuangan negara yaitu: Penetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berbagai peraturan serta perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan telah disusun guna dijadikan sebagai landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government* (Nurlaela, 2010:2).

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas

menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau full disclosure.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Paragraf 9) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai karakteristik kualitatif meliputi relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Khusus untuk karakteristik kualitatif relevan, sebuah informasi dalam laporan keuangan pemerintah dinyatakan memiliki nilai relevan jika informasi tersebut memenuhi empat kriteria, yang terdiri dari nilai umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timeliness*) dan lengkap (*completeness*).

Nurani dan Sumiyati (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintahan Daerah Di Jawa Barat)” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Nugraheni dan Subaweh (2008) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan” hasil penelitiannya menunjukkan, tanpa penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana diperoleh angka konstanta peningkatan kaulitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebesar 46.650.

Nugraeni dan Budiantara (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja” hasil penelitiannya yaitu, Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Tetapi Tidak Berpengaruh Langsung Terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu: peneliti terdahulu menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Dari 75 kuesioner yang dikirim, hanya 65 kuesioner yang memenuhi syarat untuk diproses dan uji hipotesis menggunakan analisis jalur. Sedangkan penelitian ini menggunakan, Metode pengumpulan data dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan (*Library Reseach*). Dan Metode analisis datanya menggunakan uji regresi dan uji korelasi linear sederhana. Sistematis dari pengolahan ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan uji normalitas data untuk kedua variabel untuk mengetahui tes yang instrumen yang digunakan apakah berdistribusi normal atau tidak. Kemudian dalam uji hipotesis penelitian, peneliti menggunakan rumus regresi dan korelasi.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Sehubungan dengan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul yaitu **“Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sul-Sel”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis akan mengemukakan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penelitian, yaitu:”Apakah Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sul-Sel?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor wilayah kementerian agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang konsep penerapan standar akuntansi

pemerintahan terutama tentang standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat pengetahuan lebih dalam tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan efektif dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang pentingnya diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai suatu standar peraturan dalam penyajian laporan keuangan.

Sebagai masukan bagi masyarakat agar dapat memberikan partisipasi, control, dan memberikan kontribusi dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggung jawaban keuangan daerah dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Bagi Kementrian Wilayah Kementrian Agama Sul-Sel agar dapat memperoleh manfaat pengetahuan lebih dalam tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan efektif dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan dalam mengambil kebijakan-kebijakan khususnya dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat memberikan kualitas yang sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dalam penyajian laporan keuangan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasa Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintahan Basis AkruaI (PMK 270/ PMK 05/ 2014)

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau full disclosure.

SAP Berbasis AkruaI adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di

pemerintah pusat, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pengembangan aplikasi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan siklus anggaran.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual (PMK 270/ PMK 05/ 2014)

Penerapan SAP Berbasis Akrual menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi, Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk BUN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran Negara. Penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk Kementerian/Lembaga dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Kementerian/Lembaga memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lain-Lain.

3. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Nurlaila (2014: 31) menyatakan bahwa efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya.

Suatu sistem dikatakan efektif jika output yang dihasilkan oleh suatu orang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dari penjelasan diatas dapat didimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan tersebut adalah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mahmudi (2011:271), Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berikut adalah manfaat standar akuntansi pemerintahan:

- a. Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.
- b. Standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya.
- c. Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan.

- d. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.
- e. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

5. Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mursyidi (2009:1), akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) banyak menyatakan teminologi lama dan bergeser ke istilah akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Nordiawan *et.al* (2007:4), menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan menghususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dibadan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Selain itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku. Dengan beragam karakteristik organisasi pemerintahan yang telah disajikan, akuntansi pemerintahan berkembang dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan

investasi yang besar pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya.

- 2) Tidak ada pengungkapan laba, Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan, tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.
- 3) Tidak ada pengungkapan kepemilikan, Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan, dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal sebuah neraca perusahaan.
- 4) Penggunaan akuntansi dana, Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai kepemilikan. Hal ini memberikan implikasi pada penggunaan persamaan akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo laba.

Menurut Revrisond Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang

akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Bachtiar Arif,dkk (2002 :3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklaifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002 :143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

b. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bachtiar arif, Muchlis, dan Iskandar dalam mengungkapkan Akuntansi Pemerintahan, tujuan dari definisi akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis tersebut pada umumnya adalah sama yaitu :

- 1) Akuntabilitas :Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi.

Pelaksanaan fungsi tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).

- 2) Manajerial :Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan suatu perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, sebagai melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.
- 3) Pengawasan :Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan ketaatan , pemeriksaan keuangan secara umum, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

Muindro (2010) menjelaskan bahwa tujuan SAP adalah:

- a) Menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansi melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar, praktek, dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang pelaksanaan anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, instansi dan lembaga yang secara nasional berguna sebagai dasar

penilaian kinerja, menentukan kegiatan otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.

- c) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan pemerintah pusat dan instansi/lembaga secara keseluruhan.
- d) Menyediakan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien dan efektif.

c. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan tujuan pemerintah diatas, Bachtiar Arif, Muclis, Iskandar (2002:7) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
- 2) Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
- 3) Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
- 4) kuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
- 5) Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
- 6) Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

6. Laporan Keuangan Pemerintah

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Permadi (2013: 49) menyatakan laporan keuangan adalah suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Adapun definisi lain dari laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007: 7).

Mardiasmo (2002: 160) menyatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Menurut Kasmir (2012:7) laporan keuangan adalah “laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Menurut Subramanyam (2012:79) laporan keuangan adalah “produk proses pelaporan keuangan yang diatur oleh standar dan aturan akuntansi, insentif manajer, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan”.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Kasmir (2012:10) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah:

- 1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini.
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 6) Memberikan informasi tentang catatan – catatan atas laporan keuangan.
- 7) Informasi keuangan lainnya.

Mahmudi (2011:276) menyatakan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Sedangkan pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

c. Komponen Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat tujuh laporan keuangan pokok, yaitu:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan ikhtisar sumber, lokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- 3) Neraca, merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk suatu entitas pada saat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 4) Laporan Operasional (LO), menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
- 5) Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran,

laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

d. Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2010:35), analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Sedangkan pengertian analisis laporan keuangan menurut Harahap (2006: 190) adalah sebagai berikut: “analisis laporan keuangan yaitu menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lainnya baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang sangat tepat”.

e. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Definisi laporan keuangan menurut Mahmudi (2010: 1) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sedangkan Mardiasmo (2004: 159) mendefinisikan laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai, posisi keuangan, kinerja perusahaan/organisasi, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lain yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi dari suatu kesatuan usaha. Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP No 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual adalah merupakan laporan yang

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Berdasarkan SAP tahun 2010 laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (laporan perubahan SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2010: 25) bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni:

1) Releven

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan menurut SAP No.71 (2010: 25) setidaknya memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik.

3) penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

4) Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

5) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

6) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

7) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan yang telah dilakukan sebelumnya, beberapa penelitian tersebut adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Nurani dan Sumiyati (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintahan Daerah Di Jawa Barat)” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” hasil penelitiannya menunjukkan, tanpa penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana diperoleh angka konstanta

peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebesar 46.650.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni dan Budiantara (2015))melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja” hasil penelitiannya yaitu, Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Tetapi Tidak Berpengaruh Langsung Terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktarina dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang” Hasil penelitiannya berdasarkan hasil pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas aparatur Pemerintah Daerah, dan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas Dan Widyawati (2015)) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” Hasil penelitiannya yaitu, pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,622, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerapan standar akuntansi

pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah” Hasil penelitiannya bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh Udiyanti dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa,

1. standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3. kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4. standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Inapty dan Martiningsih (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating.

Penelitian yang dilakukan oleh Singkali dan Widuri (2014) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Toraja Utara Hasil penelitian ini menunjukkan Berdasarkan penelitian ini, evaluasi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian atas pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian korelasi pearson terhadap variable implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem

informasi akuntansi memiliki hubungan yang sangat kuat/erat dengan kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu Bentuk *Mapping*

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	444METODE PENELITIAN & VARIABEL YANG DIGUNAKAN	HASIL PENELITIAN
1	Nurani H & Sumiyati (2014)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintahan Daerah Di Jawa Barat).	- menggunakan metode survey eksplanatory - variabel yang digunakan yaitu, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan keuangan	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Nugraheni & Subaweh (2008)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	- Instrumen penelitian menggunakan kuesioner - Sistem Akuntansi Pemerintahan (Pengelola UAPPA E1 dan UAPPB) serta kualitas laporan keuangan	tanpa penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana diperoleh angka konstanta peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebesar 46.650
3	Nugraeni & Budiantara	Pengaruh Standar Akuntansi	- metode analisis jalur - standar akuntansi	penerapan standar akuntansi pemerintah

	(2015)	Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja	pemerintah, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja	berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja.
4	Oktarina dkk (2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang	- metode kuantitatif dengan program SPSS Versi 20.0. - standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, <i>good governance</i> , kualitas laporan keuangan	penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas aparatur Pemerintah Daerah, dan <i>good governance</i> berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang.
5	Ningtyas & Widyawati (2015)	Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- uji regresi linear sederhana pada taraf signifikansi 5% dengan bantuan program SPSS versi 20. - Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan Kualitas Laporan Keuangan.	hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,622,
6	Mahaputra & Putra (2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-metode proportional stratified random sampling. - sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintahan, kualitas informasi laporan keuangan..	kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

7	Ari Udiyanti dkk (2014)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng)	-Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner - Standar Akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi staf akuntansi, kualitas laporan keuangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 2) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 3) kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 4) standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8	Inapty & Martiningsih (2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan	-Metode yang digunakan regresi dengan variabel moderating -variabel yang digunakan: Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Audit Internal, Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan penewrapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi

				laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir

Sebagaimana sektor swasta pemerintah merupakan sektor publik yang membutuhkan akuntansi baik untuk meningkatkan mutu pengawasan lembaga pemerintah maupun sebagai penyedia informasi keuangan yang berkaitan. Badan usaha milik Negara / badan usaha milik daerah, yayasan, universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

Akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan terkait dengan perusahaan biasa disebut akuntansi bisnis, sedangkan yang terkait dengan usaha nonprofit dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik. Maka dari itu pemerintah daerah merupakan organisasi non profit, jadi akuntansi yang berkaitan dengan pemerintah daerah yakni akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik.

Dalam peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada tingkat pemerintahan daerah daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

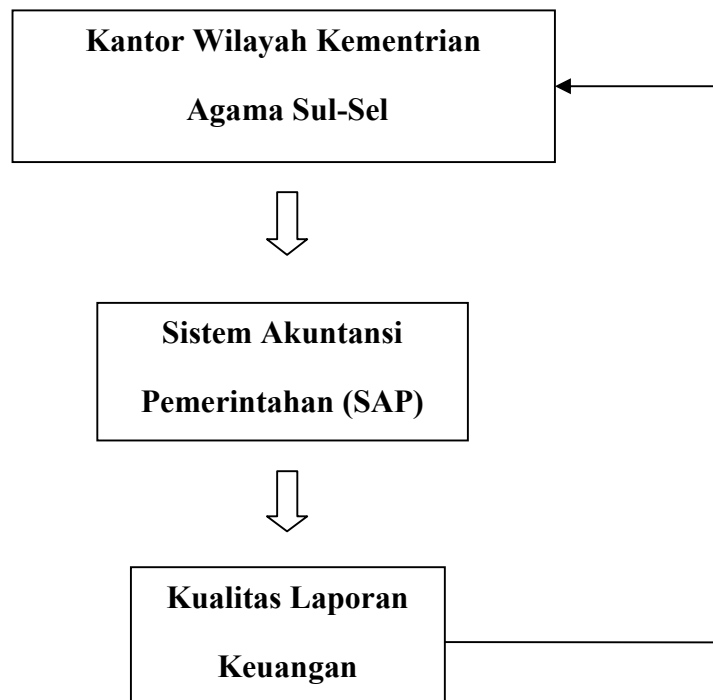
Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada pemerintah daerah melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Laporan keuangan pemerintah ditunjukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan , namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya (peraturan pemerintah, No. Tahun 2010).

Menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah(SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah:“Ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”

Berdasarkan teori diatas menerangkan bahwa kualitas laporan keuangan ialah suatu tolak ukur dari pelaporan informasi akuntansi yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan awal yang diinginkan.

Kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut.



(Gambar 2.1)

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, diduga bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sul-Sel.

BAB III

METODOLLOGI PENELITIAN

A. Tempat Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sul-Sel dan waktu yang digunakan penelitian yaitu, pada bulan Maret-April 2017.

B. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan” adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang bersumber langsung dari informan yang tergabung dalam satuan kerja kantor wilayah kementerian agama Sul-Sel.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner pada Satuan Kerja kantor wilayah kementerian agama sul-sel dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan laporan-laporan keuangan pada kantor wilayah kemtrian agama Sul-Sel.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif atau kualitatif dan karakteristik tertentu atau sekumpulan

objek yang lengkap dan jelas sifatnya. Menurut Sugiyono (2009: 66) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dengan demikian populasi merupakan sumber suatu penyimpulan atas suatu fenomena. Karena penelitian ini dilakukan Pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Sul-Sel, maka populasi sasaran yang dipilih berdasarkan lokasi penelitian adalah semua pegawai dibagian keuangan di Kantor Kementrian Agama Sul-Sel.

Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu (Sugiyono, 2009:68). Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dan penyajian laporan keuangan. Maka sampel penelitian berdasarkan pertimbangan yang ditentukan oleh penulis adalah sebanyak 10 pegawai/responden.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan (*Library Reseach*). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
2. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.

3. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Dinas Kabupaten Enrekang, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
4. Dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen di Kantor Kementerian Agama Sul-Sel, mulai dari literatur dan buku-buku yang ada. Adapun dokumen-dokumen yang menggambar sejarah yang menerangkan struktur organisasi pada Kantor Kementerian Agama Sul-Sel.
5. Penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam kerangka konseptual disebutkan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai historis, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Responden diminta untuk memilih satu dari lima skala pada setiap pertanyaan sesuai yang dipraktikkan oleh Instansinya. Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan efektif (ditunjukkan dengan skala seluruhnya diterapkan) atau rendah (ditunjukkan dengan skala tidak diterapkan).

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Keberhasilan penerapan Basis Akuntansi Diukur dengan dua Indikator yaitu basis akrual dan basis kas. Dalam pengukuran basis akrual dan basis kas digunakan masing-masing tiga pertanyaan.

b. Nilai historis

Nilai Historis merupakan harga pada saat aktiva atau kewajiban diperoleh. Keberhasilan penerapan prinsip nilai historis diukur dengan dua indikator yaitu penilaian asset dan penilaian kewajiban.

c. Realisasi

Realisasi merupakan hasil yang dicapai dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Keberhasilan penerapan prinsip realisasi diukur dengan indikator konsep layak temu biaya-pendapatan.

d. Substansi

mengungguli bentuk forma Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Keberhasilan penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk formal diukur dengan dua indikator yaitu penyajian transaksi secara wajar dan penyajian peristiwa lainnya.

e. Perioditas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Keberhasilan penerapan Prinsip periodisitas diukur menggunakan indikator periode pelaporan.

f. Konsistensi

Konsistensi berarti perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Keberhasilan penerapan prinsip konsistensi diukur menggunakan indikator penerapan metode akuntansi.

g. Pengungkapan lengkap

Pengungkapan lengkap berarti Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Keberhasilan penerapan prinsip pengungkapan lengkap diukur menggunakan indikator kelengkapan informasi laporan keuangan.

h. Penyajian wajar

i. Penyajian wajar berarti semua informasi keuangan yang ada dalam laporan keuangan disajikan secara wajar. Keberhasilan penerapan prinsip pengungkapan lengkap diukur menggunakan tujuh indikator yaitu penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kualitatis laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang berkualitas dapat diukur melalui empat dimensi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Ke-empat dimensi tersebut mengandung beberapa indikator. Responden diminta untuk memilih satu dari lima skala pada setiap pertanyaan sesuai fakta yang mereka lihat selama ini dalam lingkungan pemerintahan. Berdasarkan jawaban responden dapat ditentukan apakah Laporan keuangan berkualitas (ditunjukkan skala

seluruhnya diterapkan) atau tidak berkualitas (ditunjukkan dengan skala tidak diterapkan).

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kerelevanan laporan keuangan diukur dengan menggunakan instrumen yang berisi empat indikator yaitu memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap.

b. Andal

Laporan keuangan bisa dikatakan andal jika informasi yang terkandung di dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan keuangan diukur dengan menggunakan 3 indikator yaitu tidak mengandung Informasi yang menyesatkan dan kesalahan material, Penyajian jujur, dan Dapat diverifikasi.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dimensi dapat

dibandingkan dapat diukur menggunakan indikator laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

F. Metode Analisis Data

menggunakan uji regresi linear sederhana. Sistematis dari pengolahan ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan uji normalitas data untuk kedua variabel untuk mengetahui tes yang instrumen yang digunakan apakah berdistribusi normal atau tidak. Kemudian dalam uji hipotesis penelitian, peneliti menggunakan rumus regresi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana. Penggunaan teknik ini karena dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel terikat (Penerapan SAP) dan satu variabel independen (Kualitas laporan keuangan) model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2011: 261) adalah:

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini harus di uji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isu atau arti sebenarnya

yang diukur (Ghozali,2009). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Analisis Faktor Konfirmatori (*Confirmatory Factor Analysis*). Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat dikonfirmasi sebuah variabel. (Ghozali,2009). Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakannya analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Dalam hal ini uji statistik untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1, dengan nilai yang dikehendaki harus $> 0,60$ (Ghozali, 2009).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009). Uji reabilitas dilakukan dengan metode *Internal consistency*. Reabilitas instrumen penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's Alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini handal atau reliable (Nunnaly dalam Ghozali, 2009).

2. Rumus Regresi sederhana

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana:

Y :Variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah)

X : Variabel independen (penerapan SAP)

b : Angka arah atau koefisien regresi

a :*Intercept* atau konstanta

3. Uji R square

Uji R square dimaknai sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabelbebas (X) terhadap variabel terkait (Y). nilai R square dapat dipakai untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terkait (Y) .

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat kantor wilayah kementerian agama

Secara nasional organisasi Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) resmi terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946, bertugas membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945.

Ketika Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara masih merupakan wilayah satu provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, instansi departemen agama di tingkat provinsi ketika itu bernama jawatan urusan agama (JAURA) berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua Jawatan Urusan Agama yang pertama dijabat oleh Bapak Gazali (1950-1952), yang berkantor di jalan Jendral Ahmad Yani Makassar (sekarang Kantor Polwiltabes Makassar). Kantor Jawatan Urusan Agama ini bertugas sebagai perpanjangan tugas pemerintahan pusat bidang agama dan keagamaan di tingkat provinsi. Setelah Bapak Gazali menjabat kepala jawatan tahun 1950-1952, dilanjutkan oleh Bapak Ismail Napu (tahun 1952-1955) dan selanjutnya H. Zainuddin (1955-1960).

Pada tahun 1960, Kantor Jawatan Urusan Agama Provinsi Sulawesi Selatan dipindahkan dari jalan Jend. Ahmad Yani ke jalan WR.Supratman pada masa Bapak Rahman Tahir (1962-1964) terjadilah peralihan wilayah administrative provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara dibagi menjadi dua wilayah.Provinsi Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai satu wilayah administrative, ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964.

Seiring dengan tuntutan pemerintah, maka pada masa jabatan K.H Hasan (1967) kantor jawatan urusan agama berubah nomenklaturnya mejadi Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan.Perubahan nomenklatur ini juga, pada saat itu dijabati oleh Bapak KH.Muh. Siri (1967-1970).

Berdasarkan Kepres Nomor 4 Tahun 1974, Keputusan Mentri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi serta susunan dan tata kerja Departemen Agama, maka instansi Departemen Agama tingkat provinsi berubah nomenklaturnya menjadi Kantor Wilyah Departemen Agama, termaksud Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Seiring dengan semakin berkembang dan semakin luasnya cakupan wilayah kerj, maka nomenklatur Perwakilan Departemen Agama dirubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Perubahan nomenklatur ini, dilatari dengan semakin luasnya cakupan wilayah kerja pemerintahan, sehingga tuntutan pelayanan yang lebih khusus dan optimal terkait dengan pembinaan agama dan keagamaan di Sulawesi Selatan menjadi suatu keniscayaan pada saat itu. Posisi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama pada saat itu dijabat oleh Bapak H. Muh. Ali Mabham Dg. Tojeng (tahun 1970-1975).

Pada tahun 2005, dilakukan serah terima asset oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat, yakni 3 (tiga) Kantor Departemen Agama Kabupaten yang dibawah Wilayah Provinsi Sulawesi Barat., seperti kabupaten polewali mamasa, majene, dan kabupaten mamuju pada saat itu.

Pada tahun 2010, atas tertib Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen Menjadi Kementrian, maka nama Departemen Agama diubah menjadi Kementrian Agama. Saat itu Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara structural membawahi 23 Kantor Kementrian Agama Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Wilayah Kementrian Agama Sulawesi Selatan, mengacuh pada tugas dan fungsi Kantor Kementrian Agama sebgaimana diatur dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 dan kemudian diubah menjadi peraturan menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementrian Agama.

B. Visi Dan Misi Perusahaan

1. VISI

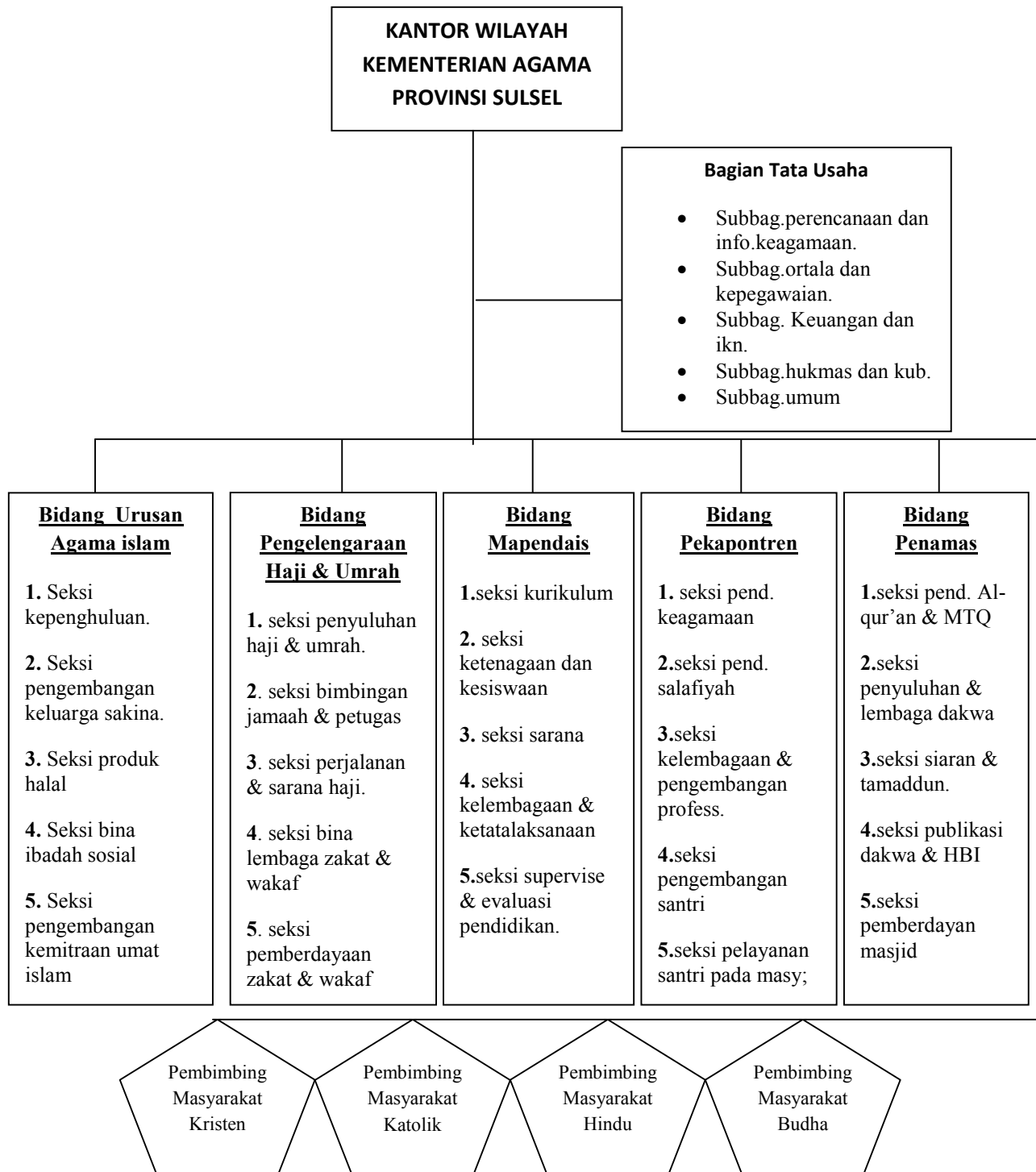
Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Taat Beragama , Rukun, Cerdas Dan Sejahtera Lahir Dan Batin Dalam Raangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Gotong Royong.

2. MISI

- a. Meningkatkan Pemahaman Dan Pengalaman Ajaran Agama
- b. Memantapkan Kerukunan Intra Dan Antra Umat Beragama
- c. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama Yang Merata Dan Berkualitas
- d. Meningkatkan Pemanfaatan Dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan
- e. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Yang Berkualitas Dan Akuntabel
- f. Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan Agama Dalam Satuan Pendidikan
- g. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Terpercaya

C. Struktur Dan Tugas Pokok

1. Struktur Organisasi



2. Tugas Pokok

a. Bagian Tata Usaha

- 1) Sub Bagian Perencanaan Dan Informasi Keamanan : melakukan pelayanan dan pembinaan dibidang penyusunan, pengendalian rencana program/anggaran, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data, dan pengembangan sistem informasi keamanan.
- 2) Sub Bagian Organisasi Tatalaksana Dan Kepegawaian : melakukan pelayanan dan pembinaan dibidang penyusunan bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tata laksana, evaluasi kinerja organisasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembinaan dan pelayanan kepegawaian.
- 3) Sub Bagian Keuangan Dan Investasi Kekayaan Negara : melakukan pelayanan dan pembinaan bidang pengelolaan keuangan dan investasi kekayaan Negara.
- 4) Sub Bagian Hukum, Humas, Dan Kerukunan Umat Beragama : melakukan pelayanan dan pembinaan dibidang penyiapan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyelesaian kasus, hubungan masyarakat, keprotkolan, dan pembinaan kerukunan umat beragama.
- 5) Sub Bagian Umum : melakukan pelayanan dan pembinaan dibidang urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Bidang Urusan Agama

- 1) Seksi Kepenghuluan : melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang nikah, tujuk, dan pemberdayaan kantor urusan agama.
- 2) Seksi Pengembangan Keluarga Sakinah : melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangn keluarga sakinah dan pemberdayan keluarga terbelakang.
- 3) Seksi Produk Halal : melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal.
- 4) Seksi Bina Ibadah Sosial : melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayan masyarkat dhuafa dan bantuan sosial.
- 5) Seksi Pengembangan Kemitraan Umat Islam : melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa dibidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraa, dan pemecahan masalah umat.

c. Bidang Pengelenggaraan Haji, Zakat Dan Wakaf

- 1) Seksi Penguluhan Haji dan Umrah : melakukan pelayanan dan bimbindang dibidang penyuluhan haji dan umrah serta pembinaan KBIH dan pasca haji.
- 2) Seksi Bimbingan Jamaah dan petugas : melakukan pelayanan dan bimbingan bagi jamaah dan petugas haji.
- 3) Seksi Perjalanan Dan Sarana Haji : melakukan pelayana dibidang dokumen dan perjalanan haji, perbekalan, akomodasi serta perizinan,akreditasi.

- 4) Seksi Bina Lembaga dan Wakaf : melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang lembaga zakat dan wakaf.

d. Bidang MADRASAH DAN PENDIDIKAN

- 1) Seksi kurikulum : melakukan penjabaran dibidang kurikulum pada madrasah, dan pendidikan agama islam disekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis kurikulum madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas, dan sekolah luar bias.
- 2) Seks Ketenagaan dan Kesiswaan : melakukan penjabaran kebijakan dibidang ketenagaan dan kesiswaan pada madrasah, dan pendidikan agama islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis dibidang ketenagaan dan kesiswaan pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas, dan sekolah luar bias.
- 3) Seksi Sarana : melakukan penjabaran kebijakan dibidang sarana pendidikan dan madrasah, pendidikan agama islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis dibidang sarana pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas, dan sekolah luar bias.
- 4) Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan : melakukan penjabaran kebijakan dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pada madrasah, pada pendidikan agama islam pada sekolah umum sertah sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis dibidang

kelembagaan dan ketatalaksanaan pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa.

- 5) Seksi Supervisi dan Evaluasi Pendidikan : melakukan penjabaran kebijakan dibidang supervise dan evaluasi pendidikan pada madrasah, pada pendidikan agama islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis dibidang supervise dan evaluasi pendidikan pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa.

e. Bidang Pendidikan Keagamaan Dan Pondok

- 1) Seksi Pendidikan Agama : melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum, ketenagan dan sarana, supervise dan evaluasi pendidikan, pada madrasah aliyah.
- 2) Seksi Pendidikan Salafiyah : melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum, ketenagan dan sarana, supervise dan evaluasi pendidikan wajib belajar pada pondok pesantren salafiyah.
- 3) Seksi Kerjasama Kelembagan dan Pengembangan Potensi Pondok Pesantren : melakukan pelayanan dan bimbingan kerjasama kelembagan dan potensi pondok pesantren dibidang pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan, ekonomi dan sosial budaya.
- 4) Seksi Pengembangn Santri : melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kegiatan dan kesejahteraan santri serta organisasi alumni.

- 5) Seksi Pelayanan Pondok Pesantren pada masyarakat : melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pelayanan taklim, ubudiyah, dan muamalah.

f. Bidang Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat Dan Pemberdayaan Masjid

- 1) Seksi Pendidikan Al-Qur'an dan Musabaqah Tilawatil Qur'an : melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan al-qur'an dan musabaqah tilawatil qur'an dan pembinaan sarana.
- 2) Seksi Penyuluhan dan lembaga dakwah : melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang ketenagaan, bina sarana, materi dan metode lembaga dakwah.
- 3) Seksi Siaran dan Tamaddun : melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang siaran agama, seni keagamaan, dan musium keagamaan.
- 4) Seksi Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam : melakukna pelayanan dan bimbingan dibidang naska dan rekaman, hari besar islam, kitab dan pustaka keagamaan.
- 5) Seksi Pemberdayaan Masjid : melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayaan fungsi dan manjemen masjid.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Sistem akuntansi pemerintahan yang digunakan pada kantor wilayah kementerian agama sulses yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan Basis AkruaI (PMK 270/ PMK 05/ 2014) SAP Berbasis AkruaI adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis sakruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akruaI di pemerintah pusat, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pengembangan aplikasi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan siklus anggaran.

Penerapan SAP Berbasis AkruaI menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi, Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang

terkait dengan pengelolaan APBN dimulaidari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk BUN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran Negara. Penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk Kementerian/Lembaga dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Kementerian/Lembaga memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lain-Lain.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Tabel 5.1
Uji Validitas

Variabel	Indicator	Nilai	Keterangan
X	penerapan SAP		
	P1.X	0,613	valid
	P2.X	0,410	Valid
	P3.X	0,454	Valid
	P4.X	0,482	Valid
	P5.X	0,769	Valid

Y	P6.X	0,620	Valid
	P7.X	0,189	Tidak valid
	P8.X	0,475	Valid
	P9.X	0,604	Valid
	P10.X	0,672	Valid
	Kualitas Laporan Kuangan		
	P1.Y	0,819	Valid
	P2.Y	0,664	Valid
	P3.Y	0,156	Tidak valid
	P4.Y	0,509	Valid
	P5.Y	0,607	Valid
	P6.Y	0,619	Valid
	P7.Y	0,424	Valid
	P8.Y	0,451	Valid
	P9.Y	0,432	Valid
P10.Y	0,819	valid	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel X pertanyaan no.1 sampai 10 dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari 0,3 kecuali pertanyaan no.7 tidak valid (0,189) karena lebih kecil dari 0,3. Sedangkan variabel Y pertanyaan no.1 sampai 10 dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari 0,3 kecuali pertanyaan no.3 tidak valid (0,156) karena r hitung lebih kecil dari 0,3.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 5.2
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Alpha	Ket
1	Penerapan SAP	0,730	reliabel
2	Kualitas laporan keuangan	0,742	reliabel

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui angka alpha dari variabel Penerapan SAP adalah 0,730 dan angka dari variabel Kualitas Laporan Keuangan adalah 0.742. jadi angka tersebut (0.730 dan 0,742) lebih besar dari minimal alpha 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan dapat dikatakan Reliabel atau Handal.

2. Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 5.3
Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.638	1.076		2.451	.021
	Penerapan SAP	.930	.027	.988	33.968	.000

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.638	1.076		2.451	.021
	Penerapan SAP	.930	.027	.988	33.968	.000

a. Dependent Variable : kualitas laporan Keuangan pemerintah

Dari hasil regresi yang diperoleh Maka dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 2,638 + 0,930 X$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstanta (a) sebesar 2,638 yang berarti bahwa jika kualitas laporan keuangan pemerintah tidak dipengaruhi oleh variable penerapan system akuntansi pemerintahan (SAP), maka besarnya variable kualitas laporan keuangan sebesar 2,638.
- b) Koefisien regresi kualitas laporan keuangan pemerintah bernilai positif sebesar 0,930 hal ini menunjukkan penerapan system akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

3. Uji R square

Tabel 5.4
Uji R square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988 ^a	.976	.975	.502

a. Predictors: (Constant),
kualitaslaporakuanganpemerintah

R square menggambarkan seberapa besar variabel independen dan secara bersama-sama dapat menjelaskan dependennya. Pada gambar 5.4 terlihat besarnya R square untuk penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 0.976 atau 97.6%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh efektivitas penerapan standar kuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah adalah 97.6% yang artinya sangat berpengaruh. Sedangkan sisanya (2.4%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

C. PEMBAHASAN

Hasil uji pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa T hitung 33,968 dengan nilai signifikansi $0,021 < 0,05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien 0,930 menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 97,6% dan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan standar akuntansi pemerintahan semakin baik maka semakin berkualitas juga laporan keuangan pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sesuai dengan yang diharapkan memerlukan peraturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan/pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah dalam hal ini adalah standar akuntansi pemerintah.

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan

keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kasmenujuakrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau full disclosure.

SAP Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dipemerintah pusat, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Secara garis besar hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Sul-Sel.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu : penelitian yang dilakukan oleh Nuraini dan Sumiyati (2014) dengan judul “pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan “ hasil penelitiaannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP)

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan . dan Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas Dan Widyawati (2015)) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” Hasil penelitiannya yaitu, pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,622, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel sudah sangat efektif, sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah pun sudah sangat berkualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS. Subjek dalam penelitian ini adalah 30 pegawai kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel bagian keuangan. Dengan 10 koefisien yang disebarkan.

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa $T_{hitung} 33,968$ dengan nilai signifikansi $0,021 < 0,05$ dan hasil uji regresi nilai koefisien $0,930$ menunjukkan bahwa variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang ada, adapun saran yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, sebaiknya staf pemerintah pada kantor wilayah kementerian agama lebih memperhatikan penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integrasi yang tinggi sehingga paham terhadap standar dan aturan yang sudah ditetapkan.
2. Selain itu untuk karyawan/staf pada kementerian agama yang telah mengikuti sosialisasi mengenai standar akuntansi pemerintahan dan sudah memiliki kemampuan atau kompetensi dibidangnya diharapkan tidak dipindahkan kebagian yang lain dan menggantikannya dengan karyawan yang baru sehingga kualitas dari laporan keuangan tersebut akan terjaga dan lebih bias ditingkatkan lagi.
3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar memperluas objek penelitian dan menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dalam penggunaan metode analisis penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta :Salemba Empat.
- Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta :Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Inapty Adha, Martiningsih P.S, (2016). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Perran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 9(1) P.27-42.
- Juwita Rukmi, (2013). *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Volume 12, No. 2, Hal.201–214.
- Mahaputra Rama, Putra W.I (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Vol. 8.2 230-244.
- Muindro, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit PT MitraWacana, Jakarta
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres. Yogyakarta.
- Mardiasmo 2002. *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*. Andi. Yogyakarta.
- Munawir, 2010, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi keempat. Penerbit. Liberty, Yogyakarta.
- Ningtyas E.A (2015). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal, Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 4 No.1
- Nugraeni, M. Budiantara (2015). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja*. Jurnal, Dinamika Ekonomi & Bisnis. Vol.12 No.1
- Nugraheni Purwaniati, Subaweh Imam (2008). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal, Ekonomi Bisnis. Vol.13 No.1

- Oktarina Mia, dkk (2016). *Pengaruh Penerapan Stanadar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah Dan Good Governace Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dikota Semarang*. Vol. 2 No. 2
- Permadi, A.D. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah*
- Revrisond Baswir. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Sumiyati E.E, Nurani Heni, (2014). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Suvey Pada Pemerintah Daerah Dijawa Barat)*.
- Singkali F.Y, Widuri Retnaningtyas (2014). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara*. Jurnal Tax & Accounting Riview Vol.4 No.2
- Udiyanti A.N dkk, (2014).*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Vol.2 No.1

Lampiran 2

KUISIONER PENELITIAN

Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sul-Sel

Responden yang Terhormat,

Memohon kesediaan anda untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuisisioner ini. Peneliti berharap anda menjawab dengan leluasa sesuai dengan yang anda rasakan. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan untuk mengisi kuisisioner sebagai terlampir.

Jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/i akan digunakan untuk keperluan penelitian. Data jawaban tersebut selanjutnya merupakan salah satu sumber data dalam penyusunan skripsi saya pada program S1 pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Oleh karena itu mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab kuisisioner dengan teliti sesuai dengan kondisi yang terjadi pada satuan kerja Bapak/Ibu/Saudara/i. Sesuai dengan kode etik penelitian, peneliti menjamin kerahasiaan semua data. Kesesuaian anda untuk mengisi kuisisioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi peneliti.

Atas segala bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I sekalian saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Siska

Identitas peneliti:

Nama : Siska

NIM : 105730421813

Program Studi : S1 Akuntansi / Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Institusi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Petunjuk Pengisian

1. Isilah identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dengan benar pada tempat jawaban yang telah disediakan.

2. Pilihlah dan berilah tanda (√) jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I anggap sesuai

Jawaban:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Identitas Responden

Nomor Kuesioner : _____

Nama* : _____

Jenis Kelamin : _____

Umur : _____

Pendidikan Terakhir** : SMA / D3 / S1 / S2 / S3

Jabatan Sekarang : _____

Lama Masa Kerja : _____ tahun _____ bulan

(* boleh tidak diisi)

** lingkari jawaban anda

KUISIONER

A. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Apakah lebih efisien penerapan akuntansi basis akrual dibanding basis kas.					
2	Apakah pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual.					
3	Apakah pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual telah dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.					
4	Apakah penyusunan standar akuntansi pemerintahan ditugaskan pada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden.					
5	Apakah prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.					
6	Apakah keberhasilan penerapan prinsip nilai historis diukur dengan penilaian asset dan penilaian kewajiban.					
7	Apakah keberhasilan penerapan prinsip realisasi diukur dengan konsep layak temu biaya-pendapatan.					

8	Apakah transaksi dan peristiwa lain perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.					
9	Apakah kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya dapat ditentukan.					
10	Apakah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.					

B. Kualitas laporan keuangan pemerintah

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Apakah laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini.					
2	Apakah laporan keuangan bisa dikatakan andal jika informasi yang terkandung di dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.					
3	Apakah informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
4	Apakah setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					
5	Apakah Sumber daya manusia yang memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai sangat berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.					
6	Apakah dengan Pengelolaan data keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi					

	memberikan banyak keunggulan dari sisi keakuratan/ketepatan dan kemudahan dalam menyusun laporan keuangan.					
7	Apakah SAP menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.					
8	Apakah SAP menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan					
9	Apakah SAP menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.					
10	Apakah SAP menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.					

Lampiran 3

TABULASI :

NO	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	JUMLAH
1	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	44
2	5	5	3	4	4	4	4	4	4	5	42
3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	40
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
7	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	46
8	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	41
9	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	36
10	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38
11	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	38
12	3	3	5	5	4	4	4	3	3	3	37
13	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	37
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
16	5	4	5	5	5	4	3	3	5	5	44
17	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	39
18	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	43
19	4	5	5	4	5	5	4	3	3	4	42
20	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
21	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	45
22	4	3	4	4	2	4	4	4	3	4	36
23	5	3	4	4	4	3	4	4	4	5	40
24	4	5	4	4	4	4	4	4	2	4	39
25	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	35
26	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	38
27	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	32
28	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	37
29	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	32
30	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	36

NO	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	JUMLAH
1	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	43
2	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	41
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
7	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	45
8	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4	41
9	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	36
10	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38
11	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
12	3	4	3	3	3	3	5	5	4	4	37
13	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
16	5	3	3	5	5	4	5	5	5	4	44
17	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	39
18	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	43
19	4	4	3	3	4	5	5	4	5	5	42
20	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
21	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	45
22	4	4	4	3	4	3	4	4	2	4	36
23	4	4	4	4	5	3	4	4	4	3	39
24	3	4	4	2	4	5	4	4	4	4	38
25	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	35
26	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	39
27	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	33
28	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	36
29	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	32
30	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	36

LAMPIRAN 4

SPSS SIGNIFIKAN :

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kualitas laporan keuangan pemerintahan	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PENERAPAN SAP

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.988 ^a	.976	.975	.502	.976	1153.807	1	28	.000	1.401

a. Predictors: (Constant), KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	2.638	1.076		2.451	.021
	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH	.930	.027	.988	33.968	.000

a. Dependent Variable : PENERAPAN

SAP

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	32.40	45.42	39.07	3.167	30
Std. Predicted Value	-2.105	2.007	.000	1.000	30
Standard Error of Predicted Value	.092	.217	.124	.039	30
Adjusted Predicted Value	32.26	45.51	39.07	3.170	30
Residual	-1.051	1.018	.000	.493	30
Std. Residual	-2.094	2.029	.000	.983	30
Stud. Residual	-2.146	2.068	.000	1.018	30
Deleted Residual	-1.104	1.058	.000	.530	30
Stud. Deleted Residual	-2.305	2.206	-.004	1.057	30
Mahal. Distance	.002	4.431	.967	1.339	30
Cook's Distance	.000	.200	.038	.049	30
Centered Leverage Value	.000	.153	.033	.046	30

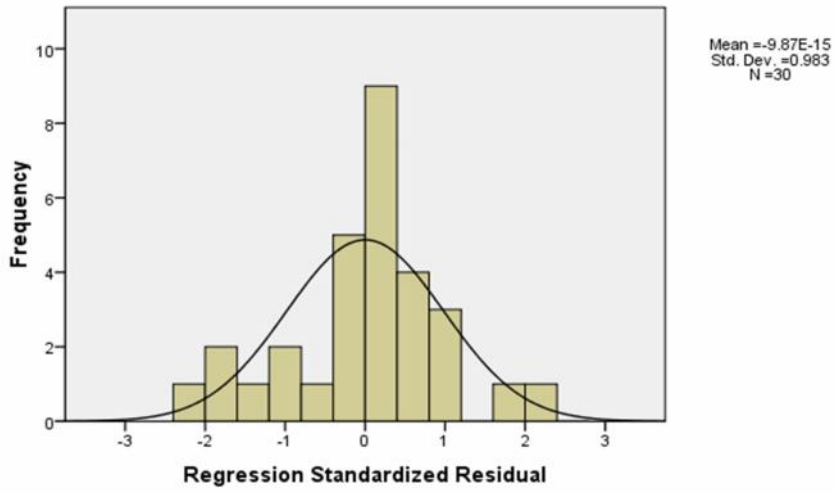
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	32.40	45.42	39.07	3.167	30
Std. Predicted Value	-2.105	2.007	.000	1.000	30
Standard Error of Predicted Value	.092	.217	.124	.039	30
Adjusted Predicted Value	32.26	45.51	39.07	3.170	30
Residual	-1.051	1.018	.000	.493	30
Std. Residual	-2.094	2.029	.000	.983	30
Stud. Residual	-2.146	2.068	.000	1.018	30
Deleted Residual	-1.104	1.058	.000	.530	30
Stud. Deleted Residual	-2.305	2.206	-.004	1.057	30
Mahal. Distance	.002	4.431	.967	1.339	30
Cook's Distance	.000	.200	.038	.049	30
Centered Leverage Value	.000	.153	.033	.046	30

a. Dependent Variable: PENERAPAN SAP

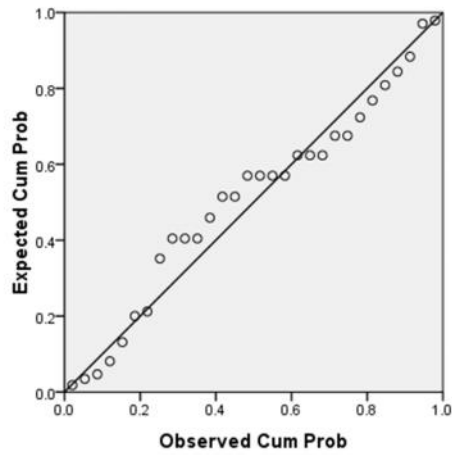
Histogram

Dependent Variable: PENERAPAN SAP



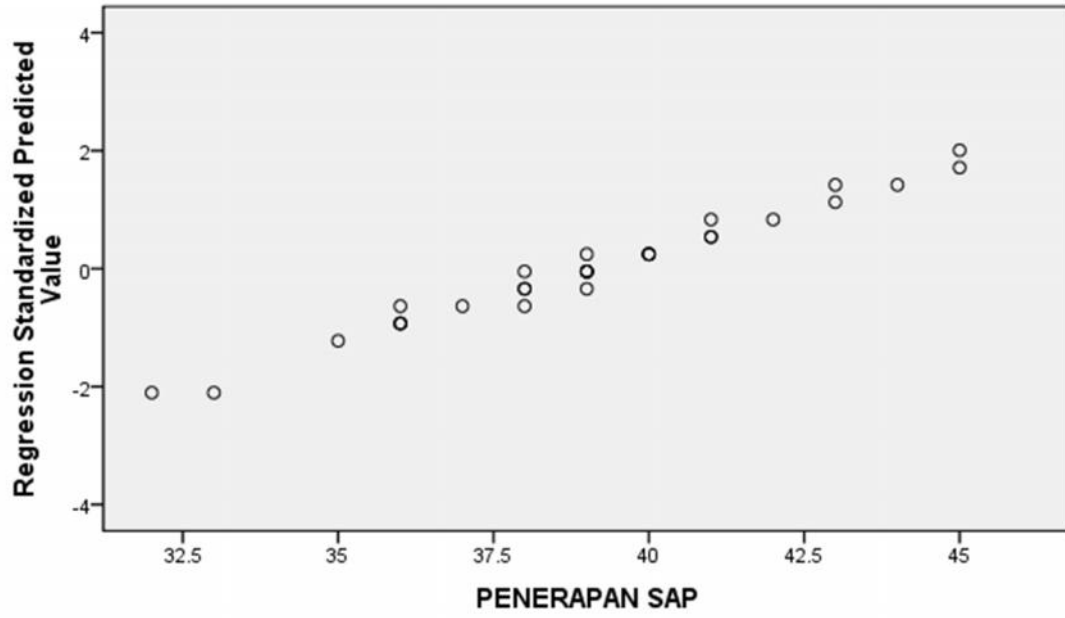
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PENERAPAN SAP



Scatterplot

Dependent Variable: PENERAPAN SAP



LAMPIRAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.756	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
pernyataan 1	35.17	8.420	.739	.686
pernyataan 2	35.30	8.976	.527	.719
pernyataan 3	35.17	11.316	.023	.778
pernyataan 4	35.27	9.995	.374	.742
pernyataan 5	35.33	9.333	.465	.729
pernyataan 6	35.27	9.582	.504	.726
pernyataan 7	35.17	10.351	.286	.753
pernyataan 8	35.33	10.023	.280	.757
pernyataan 9	35.33	10.023	.244	.764
pernyataan 10	35.17	8.420	.739	.686

ITEM 7	Pearson Correlation	.204	.193	-.144	.000	.101	.240	1	.507**	.094	.204	.424*
	Sig. (2-tailed)	.279	.308	.447	1.000	.594	.202		.004	.621	.279	.019
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 8	Pearson Correlation	.248	.260	-.351	-.146	.014	.146	.507**	1	.394*	.248	.451*
	Sig. (2-tailed)	.186	.165	.057	.442	.943	.442	.004		.031	.186	.012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 9	Pearson Correlation	.307	-.048	-.108	-.045	.241	.045	.094	.394*	1	.307	.432*
	Sig. (2-tailed)	.099	.800	.568	.813	.199	.813	.621	.031		.099	.017
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 10	Pearson Correlation	1.000*	.551**	.000	.391*	.331	.391*	.204	.248	.307	1	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	1.000	.032	.074	.032	.279	.186	.099		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	Pearson Correlation	.819**	.664**	.156	.509**	.607**	.619**	.424*	.451*	.432*	.819**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.411	.004	.000	.000	.019	.012	.017	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8	ITEM 9	ITEM 10	PENERAPAN SAP
ITEM 1 Pearson Correlation	1	.000	.146	.495**	.587**	.148	.138	.080	.146	.540**	.613**

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 8	Pearson Correlation	.080	.000	-.146	-.045	.391*	.240	.415*	1	.437*	.310	.475**
	Sig. (2-tailed)	.673	1.000	.442	.813	.032	.201	.023		.016	.095	.008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 9	Pearson Correlation	.146	.101	.014	.241	.331	.417*	.234	.437*	1	.243	.604**
	Sig. (2-tailed)	.442	.594	.943	.199	.074	.022	.213	.016		.196	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 10	Pearson Correlation	.540**	.240	.146	.045	.391*	.517**	.277	.310	.243	1	.672**
	Sig. (2-tailed)	.002	.202	.442	.813	.032	.003	.139	.095	.196		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PENERA PAN SAP	Pearson Correlation	.613**	.410*	.454*	.482**	.769**	.620**	.189	.475**	.604**	.672**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.025	.012	.007	.000	.000	.317	.008	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

RIWAYAT HIDUP



Siska, lahir di Mallinrung yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 05 Mei 1995, anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan Umar dan Hj.Mare. Adapun jenjang pendidikan penulis lalui yaitu di SDN 179 Mallinrung Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTSN Lappariaja Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2010, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN Lappariaja Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 berhasil lulus tes perguruan tinggi pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar program strata satu (S1) non Pendidikan dan akan menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan”